



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Polemik Gedung Baru DPR: Dewan Berkukuh Bangun Megaprojek
Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2015
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 8

POLEMIK GEDUNG BARU DPR

Dewan Berkukuh Bangun Megaprojek

Jokowi tidak bersedia menandatangani prasasti pembangunan gedung baru DPR.

Mahardika Satria Hadi
mahardika@tempo.co.id

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat melanjutkan rencana pembangunan kompleks gedung baru. Ketua Badan Usuran Rumah Tangga DPR, Roem Kono, berharap tahapan awal pembangunan gedung bisa segera dimulai tahun ini. "Kapan lagi kita mulai? Sampai sepuluh tahun lagi enggak dimulai," ujar dia saat dihubungi.

Roem menilai kesiapan gedung parlemen untuk masa saat ini sudah tidak lagi punya. Menurut dia, tempat berkarya para wakil rakyat di Kawasan Senayan tersebut kini dihimpuni sekitar 6.000 orang. Padahal kapasitas gedung hanya 800 orang. "Bisa bayah nanti. Kalau itu roboh *ginama kita*, ujar politikus Partai Golkar ini."

DPR kembali menyetujui rencana pembangunan gedung baru pada Februari lalu. Gedung utama untuk ruang anggota dan tenaga ahli bakal dilengkapi fasilitas alun-alun, museum, perpustakaan, pusat kunjungan parlemen, serta kajian legislatif. Rencana pembangunan proyek ini mencapai Rp 1,2 triliun, yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dan APBN 2016.

Rencana pembangunan gedung baru DPR menuai pro-kontra sejak digagas pada 2009. Semula Dewan merencanakan pembangunan didanai Rp 1,1 triliun pada 2011. Gedung 36 lantai itu nantinya dilengkapi fasilitas helipad, kamar tidur, dan kolam renang. Namun belakangan rencana itu ditunda karena memenuhi protes keras dari masyarakat.

Roem mengatakan gedung baru DPR merupakan bagian dari rencana strategis parlemen hingga 2019. "Kami harus perbaiki citra, transparansi, dan perlusaraan dan prasarananya memadai, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat," katanya.

Menurut Roem, tidak ada yang istimewa dengan rencana pembangunan gedung baru DPR. Ia mengaku heran bahwa banyak maraknya reaksi populer dari sebagian elemen masyarakat.

"Lembaga-lembaga tinggi negara yang lain sudah membangun gedung, kenapa kami menjadi



Maket gedung baru DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Yang Lebih Mendesak daripada Gedung

Di sejumlah negara, anggota Dewan, Kongres, maupun Senat tidak bekerja sendiri. Agar tampil optimal, para wakil rakyat itu dibantu oleh *parliamentary budget officer*. Memerlukan badan atau lembaga pendukung untuk memfasilitasi fungsi parlemen dalam sistem anggaran negara.

Hingga kemarin, pemerintah belum menentukan sikap ihal rencana pembangunan gedung baru DPR. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pembahasan anggaran belum sampai ke Satuan III, yang membuat sindiran program "Kalau sudah lihat, ya, bisa konfirmasi," kata dia kemarin.

Namun, Presiden Jumat pekan lalu, Joko Widodo tidak bersedia menandatangani prasasti pembangunan gedung baru DPR seusai acara pembacaman pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan. "Beliau kalau belum tanda tangan kan pasti masih ada yang dipertimbangkan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ahad lalu.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sudipto, mengatakan DPR sebaiknya membangun *budget office* serta mengaktifkan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara guna menunjang kinerja. "Tidak kemudian mengalokasikan gedung DPR yang tidak urgensi."

● MAHARDIKA | TRI ARTINING PUTRI | ANANDA TERESIA

tiga fungsi parlemen: "Kerjanya kelihatan dan tidak parsial dalam mendukung *output* kepada setiap anggota DPR," ujarnya.

Meski bertujuan efektif di parlemen beberapa negara, *budget office* tampaknya belum akan mampir di DPR. Jangan-jangan membentuk *budget office*, DPR justru menghapus keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). BAKN dicoret dari daftar alat kelengkapan Dewan saat pembahasan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tahun 2015.

Yenny menilai DPR mengakifkan karier BAKN karena berperan vital untuk membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. BAKN juga berwenang mengawasi dan mengevaluasi kementerian serta lembaga. "Bisa memanggil kementerian atau lembaga jika dianggap agak menyimpang dalam penganggaran," ujarnya.

Di Senayan, *budget office* justru lebih dulu ada di Dewan Perwakilan Daerah. Dalam strukturnya, Ketua Budget Office DPR dibantu oleh bagian sekretariat; pusat informasi; keseimbangan kebijakan antara makro dan mikro; perjalanan dan retribusi; kesesuaian APBN dan APBD serta pengawasan anggaran; dan anggaran perkembangan otonomi daerah.

● MAHARDIKA | BERBAGAI SUMBER

Pasang-Surut Gedung Baru

Usulan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat berawal pada 2009. Ketika itu Sekretariat Jenderal DPR menyodorkan konsep gedung berbentuk huruf "U" terbalik. Sempat ditolak, Tim Peningkatan Kinerja DPR, ide ini belakangan disetujui oleh anggota dan pimpinan Dewan.

• FEBRUARI 2009

Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan konsultan membuat rencana induk kompleks parlemen.

• JANUARI 2010

Ketua DPR Marzuki Alie memperoleh gambar lengkap rencana gedung baru.

• 11 MARET 2011

Biaya pembangunan ditetapkan Rp 1,138 triliun.

• 14 APRIL 2011

Empat BUMN dinyatakan lolos pra-kualifikasi jelang pembangunan gedung baru.

• 9 MEI 2011

Evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan rencana pembangunan "hanya" Rp 777 miliar. Kolam renang adalah salah satu fasilitas yang dihapus.

• 23 MEI 2011

Marzuki Ali membatalkan rencana pembangunan gedung baru karena diprotes publik. Keputusan diambil setelah berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

• 2 NOVEMBER 2014

Usulan gedung baru muncul lagi setelah Ketua Komisi Pertahanan DPR, Mahfuz Siddiqi, menyatakan anggota Dewan kekurangan ruangan untuk menunjang kerja.

• 12 FEBRUARI 2015

Desain utama penataan fisik gedung DPR masuk komponen penambahan anggaran DPR yang dilususkan Badan Usuran Rumah Tangga. Totalnya mencapai Rp 1,6 triliun.

• 20 MEI 2015

DPR memutuskan akan membangun gedung baru dengan sejumlah fasilitasnya. Nilai total untuk proyek ini sebesar Rp 1,2 triliun, dialokasikan dari APBN 2015 dan APBN 2016.

GONTI-GANTI HITUNGAN

• 8 Mei 2010

Biaya: Rp 1,8 triliun
Luas: 156 ribu meter persegi
Biaya tiap meter persegi: Rp 10,9 juta

• 1 September 2010

Biaya: Rp 1,6 triliun
Jumlah lantai: 36 lantai

• 29 Maret 2011

Biaya: Rp 1,138 triliun
Jumlah lantai: 36 lantai
Biaya tiap meter persegi: Rp 7.269.000

• 10 Mei 2011

Biaya: Rp 777 miliar
Jumlah lantai: 26 lantai

● MAHARDIKA | EVAN POAT | SUMBER DIOLAH TEMPO